



*@Hak cipta milik IPB University*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

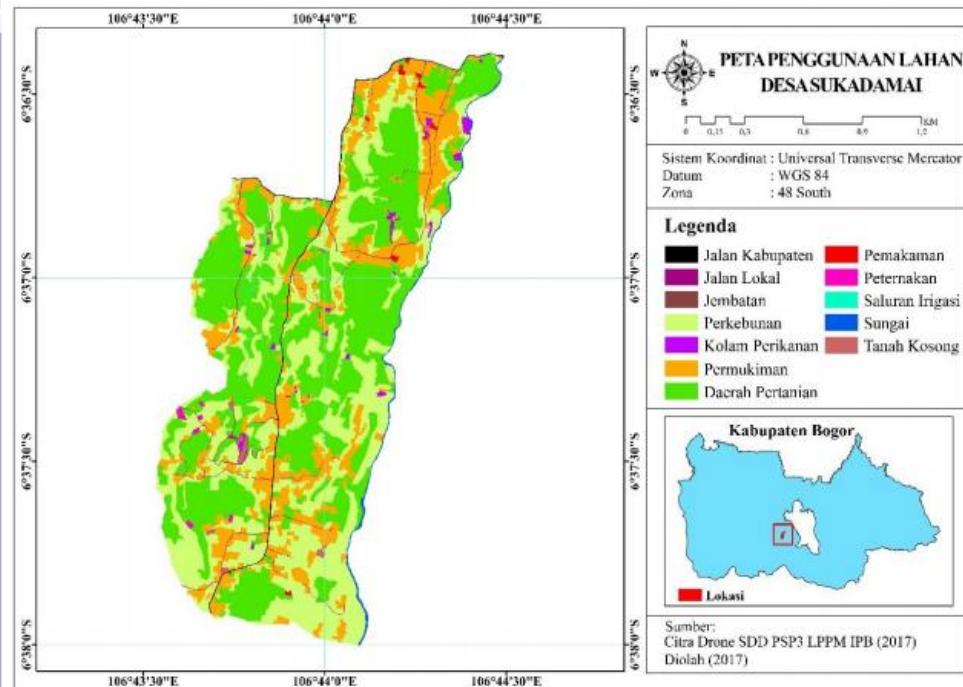
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

## LAMPIRAN

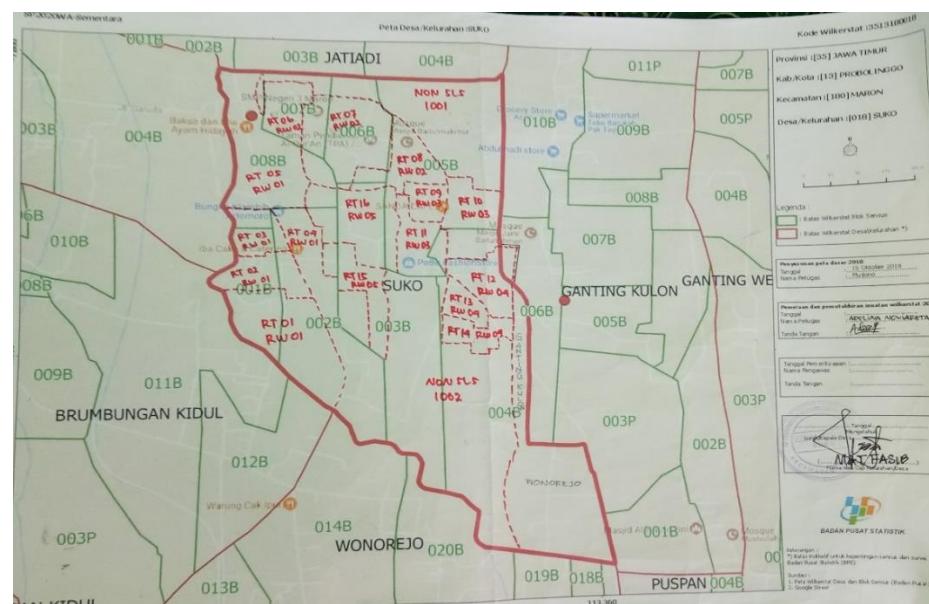


### Lampiran 1 Peta Desa Penelitian

*@Hak cipta milik IPB University*



Peta Desa Sukadamai



Peta Desa Suko

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

**MATRIK APBDesa TAHUN 2019**

Desa : SUKO

Kecamatan : MARON

**PAGU Rp.= 1.466.234.800****1.266.234.800**

<b>BESARAN</b>	<b>KODE KEGIATAN</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>Sumber Dana</b>
	<b>2,01</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>		
	<b>2.01.05</b>	Pemeliharaan Sarana Prasarana Paud/TK milik Desa	12.000.000	<b>Dana Desa</b>
	<b>2.01.05</b>	Pemeliharaan Rumah Ibadah	17.300.000	<b>Dana Desa</b>
	<b>2.01.09</b>	Pengembangan dan Pembinaan sanggar seni dan belajar	10.000.000	<b>Dana Desa</b>
	<b>2.01.10</b>	Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	5.000.000	<b>Dana Desa</b>
<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>2,02</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>		
	<b>2.02.02</b>	Penyelenggaraan Posyandu	66.905.000	<b>Dana Desa</b>
	<b>2.02.04</b>	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.790.700	<b>Dana Desa</b>
	<b>2.02.06</b>	Pengasuhan bersama atau BKB, BKL, BKR	3.125.000	<b>Dana Desa</b>
	<b>2,03</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
	<b>2.03.13</b>	Pembangunan Jembatan/GG Plat Milik Desa RT 5/RW1	76.364.000	<b>Dana Desa</b>

BESARAN	KODE KEGIATAN	KEGIATAN	JUMLAH	Sumber Dana
	<b>2.03.14</b>	Pembangunan Gorong-gorong RT 01/RW 1	17.465.400	<b>Dana Desa</b>
	<b>2.03.91</b>	Pembangunan Saluran Irigasi RT 04/RW 1	57.108.200	<b>Dana Desa</b>
	<b>2.03.14</b>	Pembangunan Drainase RT 02/RW 1	42.077.500	<b>Dana Desa</b>
	<b>2.03.14</b>	Pembangunan TPT RT 8/RW 2	39.856.800	<b>Dana Desa</b>
	<b>2.03.09</b>	Pemeliharaan Gapura	5.000.000	<b>Dana Desa</b>
	<b>2.03.18</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan tata Ruang Desa	14.089.400	<b>Dana Desa</b>
	<b>2,04</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>		
	<b>2.04.01</b>	Pembangunan / Rehabilitasi RTLH 11 unit	111.000.000	<b>Dana Desa</b>
	<b>2.04.03</b>	Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga	25.000.000	<b>Dana Desa</b>
	<b>2.04.91</b>	Pembangunan / Rehabilitasi Jamban 8 unit	41.000.000	<b>Dana Desa</b>
	<b>2,05</b>	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>		
	<b>2.05.91</b>	Pelestarian Lingkungan hidup melalui pencegahan pencemaran lingkungan	7.000.000	<b>Dana Desa</b>
	<b>2,06</b> <b>2.06.02</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>		
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	7.000.000	<b>Dana Desa</b>

BESARAN	KODE KEGIATAN	KEGIATAN	JUMLAH	Sumber Dana
<b>Pembinaan kemasyarakatan</b>	<b>3,03</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>		
	<b>3.03.04</b>	Pemeliharaan sarana dan prasarana Olahraga Milik Desa	10.000.000	<b>Dana Desa</b>
	<b>3.04.06</b>	Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD)	7.000.000	<b>ADD</b>
	<b>4,02</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>		
	<b>4.02.92</b>	Peningkatan produksi peternakan kambing	10.000.000	<b>Dana Desa</b>
	<b>4,04</b>	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan keluarga</b>		
	<b>4.04.01</b>	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	17.000.000	<b>Dana Desa</b>
<b>Pemberdayaan Kemasyarakatan</b>	<b>4.04.02</b>	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	3.000.000	<b>Dana Desa</b>
	<b>4.04.03</b>	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel	16.000.000	<b>Dana Desa</b>
	<b>4,05</b>	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah</b>		
	<b>4.05.02</b>	Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Desa dan pelatihan	15.000.000	<b>Dana Desa</b>
	<b>4.05.02</b>	kerja lainnya	6.250.000	<b>Dana Desa</b>
	<b>6,2</b>	<b>Sub Bidang Penanaman Modal</b>		

<b>BESARAN</b>	<b>KODE KEGIATAN</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>Sumber Dana</b>
	<b>6.2.2.01</b>	Penyertaan Modal BUMDES	292.000.000	<b>Dana Desa</b>
<b>Belanja Tak terduga ( 05 )</b>	<b>5.01</b>	Belanja Tidak Terduga	2.437.230	<b>SILPA</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>5.01.01</b>		1.266.234.800	
<b>1.466.234.800</b>				

## Lampiran 3. Matriks APBDES Desa Sukadamaai

**Tahun  
2019**

<b>No</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Besar Anggaran</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Sumber Dana</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD	Rp 27.000.000	Desa Sukadamaai	<b>DD Tahap I</b>
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	Rp 8.000.000	Desa Sukadamaai	<b>DD Tahap I</b>
3	Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDes	Rp 4.000.000	Desa Sukadamaai	<b>DD Tahap I</b>
4	Bangunan Pendukung TPT Jaling	Rp 30.580.500	Kp. Cilubang Rt. 03/02	<b>DD Tahap I</b>
5	Betonisasi Jalan Lingkungan	Rp 19.343.000	Kp. Cilubang Rt. 03/02	<b>DD Tahap I</b>
6	Bangunan Pendukung TPT Jaling	Rp 186.043.000	Kp. Nangela Rt. 04/03	<b>DD Tahap I</b>
7	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Rp 1.650.000	Desa Sukadamaai	<b>DD Tahap II</b>
8	Bangunan Pendukung TPT Jaling	Rp 67.887.500	Kp. Nangela Rt. 03/03	<b>DD Tahap II</b>
9	Betonisasi Jalan Lingkungan	Rp 40.619.000	Kp. Nangela Rt. 03/03	<b>DD Tahap II</b>
10	Betonisasi Jalan Lingkungan	Rp 14.850.000	Kp. Nangela Rt. 04/03	<b>DD Tahap II</b>
11	Betonisasi Jalan Lingkungan	Rp 16.056.500	Kp. Cibeureum Rt. 01/04	<b>DD Tahap II</b>
12	Bangunan Pendukung TPT Jaling	Rp 13.581.000	Kp. Cibeureum Rt. 03/04	<b>DD Tahap II</b>

No	Jenis Kegiatan	Besar Anggaran	Lokasi	Sumber Dana
13	Betonisasi Jalan Lingkungan	Rp 82.936.500	Kp. Cibeureum Rt. 03/04	<b>DD Tahap II</b>
14	Betonisasi Jalan Lingkungan	Rp 99.139.500	Kp. Kuripan Rt. 03/05	<b>DD Tahap II</b>
15	Betonisasi Jalan Lingkungan	Rp 87.600.000	Kp. Kuripan Rt. 04/05	<b>DD Tahap II</b>
16	Betonisasi Jalan Lingkungan	Rp 86.544.000	Kp. Kuripan Rt. 05/05	<b>DD Tahap II</b>
17	Betonisasi Jalan Lingkungan	Rp 32.354.000	Kp. Kuripan Rt. 06/05	<b>DD Tahap II</b>
18	Betonisasi Jalan Desa	Rp 162.403.000	Kp. Kuripan Rt. 05/05	<b>DD Tahap III</b>
10	Betonisasi Jalan Lingkungan	Rp 147.678.000	Kp. Kuripan Rt. 01/06	<b>DD Tahap III</b>
20	Betonisasi Jalan Lingkungan	Rp 142.309.500	Kp. Kuripan Rt. 02/06	<b>DD Tahap III</b>
		Rp 1.270.575.000		

## Lampiran 4. Matriks konsep dan panduan wawancara

Tujuan : Menjelaskan Gambaran Umum Desa

Konsep	Variabel	Indikator	Keyword Question	Instrumen	Pertanyaan	Informan
Teori Habitus yaitu terdapat hubungan Habitus dan bidang/lapangan	Geografis	1. Perbedaan wilayah dan potensi kedua desa. 2. Perbedaan tipologi desa di kedua desa 3. Perbedaan latar belakang etnis di kedua desa.	Wilayah Tipologi desa Etnisitas	Wawancara Wawancara Wawancara	Bagaimana perbedaan wilayah berpengaruh dalam pengelolaan dana desa di kedua desa? Bagaimana kondisi geografis dan tipologi desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa? Apa mata pencaharian sebagian besar penduduk desa? Apa sumber nafkah utama rumah tangga di desa? Apakah warga desa sangat bergantung pada hasil dari pertanian? Etnis apa yang menjadi mayoritas di desa? Bagaimana pengaruh latar belakang etnis di kedua desa mempengaruhi pengelolaan dana desa?	Perangkat desa, Kepala Desa, Tokoh masyarakat Perangkat desa, Kepala Desa, Warga desa Perangkat desa, Kepala Desa, Tokoh masyarakat

Konsep	Variabel	Indikator	Keyword Question	Instrumen	Pertanyaan	Informan
	Instansi	1. Terbentuknya BUMDes yang telah bejalan dan dikelola oleh masyarakat desa.	BUMDes	Wawancara	<p>Bagaimana pembuatan keputusan dalam perencanaan pembentukan BUMDES?</p> <p>Bagaimana proses penentuan usaha yang akan dilakukan oleh BUMDES?</p> <p>Bagaimana respon masyarakat terhadap BUMDES yang sudah berdiri?</p> <p>Bagaimana transparansi keuangan BUMDES?</p> <p>Bagaimana keterlibatan perempuan baik dalam pengelolaan dana desa maupun BUMDES?</p> <p>Faktor penyebab BUMDES tidak berjalan lancar?</p> <p>Bagaimana solusi dari permasalahan yang dihadapi BUMDES?</p>	Perangkat desa, Kepala Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh lembaga-lembaga desa, Pegawai BUMDes

Tujuan 1: Membandingkan Pengelolaan Keuangan Desa Sebelum dan Sesudah ditetapkan UU Desa

Konsep	Variabel	Indikator	Keyword Question	Instrumen	Pertanyaan	Informan
Dinamika pengelolaan keuangan desa sebelum dan sesudah UU Desa	Regulasi	1. Perbedaan Regulasi Undang-Undang (UU), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Daerah (Perda)	Undang-Undang	Wawancara	<p>Bagaimana perbedaan UU yang mengatur mengenai keuangan desa sebelum dan sesudah ditetapkan Undang-Undang Desa?</p> <p>Bagaimana perbedaan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai keuangan desa sebelum dan sesudah ditetapkan Undang-Undang Desa?</p> <p>Bagaimana perbedaan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai keuangan desa sebelum dan sesudah ditetapkan Undang-Undang Desa?</p> <p>Bagaimana perbedaan Peraturan daerah yang mengatur mengenai keuangan desa sebelum dan sesudah ditetapkan Undang-Undang Desa?</p>	<p>Perangkat Desa    Kepala Desa    Tokoh yang berpengaruh terhadap UU Desa    Aparat Pemerintah di lembaga (Kecamatan, Kelurahan)    Tokoh masyarakat desa</p>

Konsep	Variabel	Indikator	Keyword Question	Instrumen	Pertanyaan	Informan
		2. Kebebasan mengelola keuangan desa	Otonomi	Wawancara	Bagaimana aparat desa mengatur keuangan desa sebelum dan sesudah ditetapkan Undang-Undang Desa?  Bagaimana aparat desa menyikapi perbedaan peraturan yang ada?	
	Suprastruktur	3. Peraturan administratif dalam pengajuan dan pelaporan keuangan desa.	Administrasi	Wawancara	Bagaimana sistem pengajuan dana sebelum dan sesudah ditetapkan Undang-Undang Desa?	
		1. Peran lembaga/instansi di atas desa (Kecamatan, Kelurahan) terhadap pengelolaan desa	Lembaga	Wawancara	Bagaimana pengaruh dari lembaga kecamatan/kelurahan dalam pengelolaan dana desa sebelum dan sesudah ditetapkan Undang-Undang Desa?	Aparat pemerintah di lembaga (Kecamatan, Kelurahan) Aparat Desa

Konsep	Variabel	Indikator	Keyword Question	Instrumen	Pertanyaan	Informan
		2. Kunjungan aktor dari lembaga /instansi di atas desa (Kecamatan, Kelurahan)	Kunjungan	Wawancara	<p>Apakah ada kunjungan dari Kecamatan /Kelurahan sebelum dan sesudah ditetapkan Undang-Undang Desa?</p> <p>Apakah kunjungan tersebut mempengaruhi pengelolaan dana desa?</p> <p>Apakah ada permintaan dari lembaga tersebut untuk meminta aparat desa hadir dan melakukan komunikasi terkait pengelolaan dana desa?</p>	Kepala Desa
Teori Habitus struktur intern dalam restrukturisasi	Praktik pengelolaan dana desa	1. Perubahan kebiasaan dalam praktik pengelolaan dana desa	Praktik	Wawancara	<p>Bagaimana perubahan praktik pelaksanaan pengelolaan dana desa sebelum dan sesudah ditetapkan Undang-Undang Desa?</p> <p>Apa saja praktik yang berubah dalam pengelolaan dana desa sebelum dan sesudah ditetapkan Undang-Undang Desa?</p>	Perangkat desa, Kepala Desa, Tokoh masyarakat

Konsep	Variabel	Indikator	Keyword Question	Instrumen	Pertanyaan	Informan
					<p>Bagaimana perbedaan mekanisme pengajuan anggaran belanja desa diberlakukan Undang-Undang Desa?</p> <p>Bagaimana perubahan pencairan dana untuk pembangunan desa sebelum dan sesudah diberlakukan Undang-Undang Desa?</p>	
		2. Keterlibatan Masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa	Keterlibatan Masyarakat	Wawancara	<p>Bagaimana perbedaan keterlibatan warga sebelum dan sesudah diberlakukan Undang-Undang Desa?</p> <p>Apakah setelah adanya Undang-Undang Desa masyarakat lebih bersemangat dalam berpartisipasi pada program-program pemerintah di desa?</p>	Perangkat desa, Kepala Desa, Tokoh masyarakat. Warga Desa

Tujuan 2 : Menjelaskan Pengaruh Struktur dalam pengelolaan dana desa.

Konsep	Variabel	Indikator	Keyword Question	Instrumen	Pertanyaan	Informan
Struktur mempengaruhi tindakan aktor	Regulasi	1. Regulasi dan peraturan pemerintah yang mengatur prioritas penggunaan dana desa mengatur tidak hanya secara umum melainkan secara khusus.	Undang-Undang	Wawancara	<p>Bagaimana peraturan Undang-Undang yang mengatur mengenai keuangan desa?</p> <p>Bagaimana pengaruh adanya peraturan terhadap perencanaan pengelolaan dana desa?</p> <p>Bagaimana pengaruh adanya peraturan terhadap pengambilan keputusan pengelolaan dana desa?</p> <p>Bagaimana proses perencanaan anggaran belanja desa Musrenabangdes?</p>	Perangkat desa, Kepala Desa
		2. Kebebasan mengelola keuangan desa	Otonomi	Wawancara	<p>Bagaimana aparat desa mengatur keuangan desa sebelum dan sesudah ditetapkan Undang-Undang Desa?</p> <p>Bagaimana aparat desa menyikapi perbedaan peraturan yang ada?</p>	Perangkat desa, Kepala Desa, Tokoh masyarakat

Konsep	Variabel	Indikator	Keyword Question	Instrument	Pertanyaan	Informan
Struktur Sosial Politik di Desa	Suprastruktur	1. Peran lembaga/instansi di atas desa (Kecamatan, Kelurahan) terhadap pengelolaan desa	Lembaga	Wawancara	Bagaimana interaksi kepala desa dengan lembaga luar desa terkait dengan pengelolaan dana desa?  Seberapa sering koordinasi (kunjungan) dengan lembaga luar desa? Apa saja masalah yang di koordinasikan?	Perangkat desa, Kepala Desa, Tokoh masyarakat, tokoh aparatur dari lembaga di atas desa
	Aktor	1. Aktor-aktor yang berperan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa	Keterlibatan aktor	Wawancara	Siapa saja aktor-aktor yang berperan aktif dalam Musrenbangdes?  Bagaimana interaksi antar aktor pada saat Musrenbangdes berpengaruh pada proporsi alokasi anggaran dana desa?	Perangkat desa, Kepala Desa, Warga desa peserta Musrenbangdes, Tokoh masyarakat
		2. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program	Peran Perempuan	Wawancara	Apakah ada perempuan yang hadir dalam Musrenbangdes?  Apakah perempuan yang hadir di Musrenbangdes ikut beropini? Siapa saja?	Perangkat desa, Kepala Desa, warga desa yang berpartisipasi dalam

Konsep	Variabel	Indikator	Keyword Question	Instrument	Pertanyaan	Informan
	Proporsi Anggaran	pembangunan desa			<p>Apa isi opini yang disampaikan oleh perempuan yang hadir dalam Musrenbangdes?</p> <p>Seberapa banyak gagasan dari perempuan yang kemudian dilaksanakan?</p> <p>Bagaimana peran perempuan dalam pelaksanaan program-program desa?</p>	Musrenbangdes, Tokoh masyarakat perempuan
		1. Pembagian anggaran pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa	Anggaran	Wawancara	<p>Bagaimana proses penunjukkan pihak-pihak pelaksana program pembangunan yang dirancang saat Musrenbangdes?</p> <p>Bagaimana transparansi informasi keuangan dan belanja desa kepada masyarakat?</p> <p>Apakah ada perubahan anggaran dari tahun ke tahun? bagaimana proporsi perubahannya?</p>	Bendahara desa, Kepala Desa

Tujuan 3 : Membandingkan pengelolaan dana desa di Desa Sukadamai dan Desa Suko

Konsep	Variabel	Indikator	Keyword Question	Instrument	Pertanyaan	Informan
Struktur mempen garuhi tindakan aktor	Regulasi	1. Perbedaan pemaknaan regulasi dan peraturan pemerintah yang mengatur prioritas penggunaan dana desa di kedua desa.	Undang-Undang	Wawancara	Idem dengan tujuan 2	Idem dengan tujuan 2
	Regulasi Suprastruktur	2. Perbedaan di kedua desa mengenai kebebasan mengelola keuangan desa	Otonomi	Wawancara	Idem dengan tujuan 2	Idem dengan tujuan 2
		1. Perbedaan di kedua desa mengenai peran lembaga/instansi di atas desa (Kecamatan, Kelurahan) terhadap pengelolaan desa	Lembaga	Wawancara	Idem dengan tujuan 2	Idem dengan tujuan 2
	Aktor	1. Perbedaan di kedua desa mengenai aktor-aktor yang berperan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa	Keterlibatan aktor	Wawancara	Idem dengan tujuan 2	Idem dengan tujuan 2
		2. Perbedaan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan desa di kedua desa	Peran Perempuan	Wawancara	Idem dengan tujuan 2	Idem dengan tujuan 2

<b>Konsep</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Keyword Question</b>	<b>Instrument</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>
	Proporsi Anggaran	1. Pembagian anggaran pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa	Anggaran	Wawancara	Idem dengan tujuan 2	Idem dengan tujuan 2